


		UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK PROGRAM STUDI D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan		
Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah & Desa	23412205		T=2	P=0	2	10 Maret 2026		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI			
	 Harsono Ahmad S.IP, M.Si		 Harsono Ahmad S.IP, M.Si		 Elys Ibrahim, S.AP., M.Si			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL1	Mampu menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dan desa						
	CPL2	Mampu menguasai metodologi dan konsep teoretis administrasi pemerintahan daerah dan desa serta mengkaji secara ilmiah dalam perancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan.						
	CPL4	Mampu menganalisis permasalahan administrasi dan kebijakan pemerintahan daerah dan desa serta menyusun alternatif solusi secara logis dan sistematis.						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, asas, dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan Indonesia.						
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan regulasi pemerintahan daerah dan desa.						
	CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis kewenangan pemerintah daerah dan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.						
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengkaji implementasi kebijakan dan regulasi pemerintahan daerah dan desa						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)							
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.						
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi asas dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.						
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar konstitusional otonomi daerah.						
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan regulasi pemerintahan daerah						
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi pemerintahan desa.						
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu menganalisis kewenangan pemerintah daerah dan desa berdasarkan regulasi.						
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu mengkaji implementasi kebijakan pemerintahan daerah dan desa.						
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK								
CPMK / Sub-CPMK	1	2	3	4	5	6	7	
CPMK1	✓	✓						

	CPMK2			✓	✓	✓		
	CPMK3					✓	✓	
	CPMK4						✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Materi meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, dasar konstitusional otonomi daerah, perkembangan regulasi pemerintah daerah dan desa, kewenangan pemerintahan daerah dan desa, serta implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar hukum dan peraturan perundang-undangan 2. Asas dan hierarki peraturan perundang-undangan 3. Dasar konstitusional otonomi daerah 4. Perkembangan regulasi pemerintahan daerah 5. Perkembangan regulasi pemerintahan desa 6. Kewenangan pemerintah daerah dan desa 7. Implementasi kebijakan pemerintahan daerah dan desa 							
Pustaka	Utama:							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 							
	Pendukung:							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Hukum Administrasi Negara 2. Literatur Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah 							
Dosen Pengampu	Harsono Ahmad S.IP., M.Si							
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Tatap muka, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Dasar-dasar Ilmu Sosial dan Politik							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Mg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik	Bentuk Pembelaja	Materi Pembelajaran		Bobot	

				ran		
1	Sub-CPMK1	Menjelaskan pengertian hukum Menguraikan fungsi hukum dalam pemerintahan Menjelaskan hubungan hukum dan administrasi pemerintahan	Tes tertulis, tanya jawab	Kuliah dan diskusi	Konsep dasar hukum administrasi negara: • Pengertian hukum menurut perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) • Sistem hukum nasional Indonesia • Fungsi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan • Hubungan hukum administrasi negara dengan administrasi pemerintahan daerah • Peran hukum sebagai instrumen pengendalian kekuasaan pemerintahan	5
2	Sub-CPMK1	Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan Mengidentifikasi unsur-unsur peraturan perundang-undangan Memberikan contoh regulasi dalam pemerintahan daerah	Tes tertulis dan tugas ringkas	Diskusi	Konsep peraturan perundang-undangan: • Definisi peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum Indonesia • Unsur-unsur pembentuk regulasi (norma, kewenangan, bentuk) • Fungsi regulasi dalam sistem pemerintahan • Peran regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa • Contoh regulasi pusat dan daerah dalam praktik pemerintahan	5
3	Sub-CPMK2	Menjelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Mengidentifikasi asas legalitas dan kepastian hukum Mengaitkan asas hukum dengan praktik pemerintahan	Tes dan tugas analisis	Diskusi kelompok	Asas pembentukan peraturan perundang-undangan: • Asas legalitas dalam pemerintahan • Asas kepastian hukum dan keadilan • Asas keterbukaan dalam pembentukan regulasi • Asas kejelasan tujuan dan dapat dilaksanakan • Implementasi asas-asas tersebut dalam penyusunan Peraturan Daerah	5
4	Sub-CPMK2	Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Mengidentifikasi jenis peraturan pusat dan daerah Menyusun bagan hierarki regulasi	Tes tertulis dan tugas	Kuliah dan diskusi	Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia: • Struktur hierarki peraturan perundang-undangan nasional • Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara • Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden • Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota • Peraturan Kepala Daerah dan peraturan pelaksana lainnya	5
5	Sub-CPMK3	Menjelaskan dasar konstitusional otonomi daerah Mengidentifikasi pasal UUD 1945 terkait pemerintahan daerah Menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Tugas analisis dokumen	Diskusi	Dasar konstitusional pemerintahan daerah: • Pasal 18, 18A dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia • Dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan administratif • Tugas pembantuan (medebewind) • Prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan	5

6	Sub-CPMK4	Menjelaskan perkembangan regulasi pemerintahan daerah Mengidentifikasi perubahan kebijakan otonomi daerah Membandingkan UU pemerintahan daerah dari masa ke masa	Tugas dan diskusi	Diskusi	Perkembangan regulasi pemerintahan daerah: • Sejarah kebijakan otonomi daerah di Indonesia • UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah • UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah • UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kebijakan desentralisasi	5
7	Sub-CPMK4	Menganalisis implementasi regulasi pemerintah daerah Mengidentifikasi permasalahan regulasi di daerah Menyajikan hasil analisis dalam presentasi	Presentasi dan penilaian kinerja	Diskusi	Implementasi regulasi pemerintahan daerah: • Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU 23/2014 • Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) • Hubungan regulasi pusat dan daerah • Permasalahan implementasi regulasi daerah • Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi	5
8	UTS	Ujian Tengah Semester	Tes tertulis	Ujian	Evaluasi seluruh materi pertemuan 1–7	15
9	Sub-CPMK5	Menjelaskan dasar hukum pemerintahan desa Mengidentifikasi struktur regulasi desa Menjelaskan kewenangan desa menurut UU Desa	Tugas dan kuis	Kuliah	Dasar hukum pemerintahan desa: • Latar belakang lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional • Prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam pemerintahan desa • Struktur kelembagaan pemerintahan desa • Hubungan desa dengan pemerintah daerah	5
10	Sub-CPMK5	Menganalisis jenis peraturan desa Mengidentifikasi proses pembentukan peraturan desa Memberikan contoh regulasi desa	Diskusi dan penugasan	Diskusi	Peraturan desa: • Jenis-jenis regulasi di tingkat desa (Perdes, Perkades) • Proses penyusunan Peraturan Desa • Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) • Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes • Contoh implementasi peraturan desa	5
11	Sub-CPMK6	Menjelaskan konsep kewenangan pemerintah daerah Mengidentifikasi urusan pemerintahan daerah Menjelaskan pembagian kewenangan pusat dan daerah	Tugas analisis	Diskusi	Kewenangan pemerintah daerah: • Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara • Urusan pemerintahan absolut, konkuren dan umum • Pembagian kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota • Urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah • Implementasi kewenangan daerah dalam pelayanan publik	5
12	Sub-CPMK6	Menjelaskan kewenangan pemerintah desa Mengidentifikasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul Mengkaji kewenangan lokal berskala desa	Tugas dan diskusi	Diskusi	Kewenangan pemerintahan desa: • Kewenangan berdasarkan hak asal-usul • Kewenangan lokal berskala desa • Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan daerah • Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa • Implementasi kewenangan desa dalam pelayanan masyarakat	5

13	Sub-CPMK7	Menganalisis implementasi kebijakan pemerintahan daerah Mengidentifikasi hambatan implementasi regulasi Menyusun solusi alternatif	Presentasi	Diskusi	Implementasi kebijakan publik di daerah: • Konsep implementasi kebijakan publik • Model implementasi kebijakan (top-down dan bottom-up) • Faktor keberhasilan implementasi kebijakan daerah • Hambatan implementasi regulasi pemerintahan daerah • Peran birokrasi daerah dalam implementasi kebijakan	5
14	Sub-CPMK7	Menganalisis studi kasus regulasi daerah atau desa Mengidentifikasi aktor implementasi kebijakan Menyajikan analisis kasus secara sistematis	Presentasi studi kasus	Studi kasus	Studi kasus regulasi pemerintahan daerah dan desa: • Analisis kasus implementasi Peraturan D	

RUBRIK PENILAIAN

Mata Kuliah: Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah & Desa

Program Studi: D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah

A. Prinsip Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan ketercapaian Sub-CPMK dengan mengacu pada: - Indikator pada setiap pertemuan - Teknik penilaian (tes tertulis, tugas, presentasi, studi kasus) - Pendekatan pembelajaran (diskusi, studi kasus, analisis regulasi)

Aspek yang dinilai: 1. Pengetahuan (konsep hukum dan regulasi) 2. Keterampilan (analisis dan kajian kebijakan) 3. Sikap (argumentasi, etika akademik, partisipasi)

B. Skala Penilaian

Skor	Kategori	Deskripsi
4	Sangat Baik	Sangat lengkap, sistematis, kritis dan berbasis regulasi
3	Baik	Lengkap dan cukup sistematis
2	Cukup	Kurang lengkap dan kurang analitis
1	Kurang	Tidak sesuai dan tidak menunjukkan pemahaman

C. Rubrik Penilaian

1. Rubrik Tes Tertulis

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Pemahaman konsep	Menjelaskan konsep hukum & regulasi	Sangat tepat & komprehen	Tepat	Kurang tepat	Salah

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Ketepatan regulasi	Mengacu pada UU/peraturan	sif Sangat tepat & relevan	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Analisis	Mengkaji masalah hukum	Kritis & mendalam	Cukup	Dangkal	Tidak mampu

2. Rubrik Tugas Analisis

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Identifikasi masalah	Menentukan isu regulasi	Sangat jelas & relevan	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Analisis regulasi	Menggunakan dasar hukum	Sangat tepat	Tepat	Kurang	Tidak ada
Argumentasi	Logika dan sistematika	Sangat logis	Cukup logis	Lemah	Tidak logis
Solusi	Alternatif kebijakan	Inovatif & aplikatif	Cukup	Kurang	Tidak ada

3. Rubrik Diskusi

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Partisipasi	Keaktifan diskusi	Sangat aktif	Aktif	Kurang	Pasif
Relevansi	Kesesuaian pendapat	Sangat relevan	Relevan	Kurang	Tidak relevan
Argumentasi	Kekuatan pendapat	Sangat kuat	Cukup	Lemah	Tidak ada

4. Rubrik Presentasi

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Struktur	Sistematika penyajian	Sangat sistematis	Sistematis	Kurang	Tidak sistematis
Penguasaan materi	Pemahaman regulasi	Sangat menguasai	Menguasai	Kurang	Tidak
Penyampaian	Komunikasi	Jelas & meyakinkan	Cukup jelas	Kurang	Tidak jelas
Respons	Tanya jawab	Kritis & tepat	Tepat	Kurang	Tidak mampu

5. Rubrik Studi Kasus

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Pemahaman kasus	Identifikasi masalah	Sangat tepat	Tepat	Kurang	Salah
Analisis	Pendekatan regulasi	Mendalam	Cukup	Dangkal	Tidak ada
Keterkaitan teori	Hubungan teori & praktik	Sangat kuat	Cukup	Lemah	Tidak ada
Solusi	Rekomendasi	Realistis & aplikatif	Cukup	Kurang	Tidak ada

6. Rubrik UTS & UAS

Aspek	Indikator	4	3	2	1
Penguasaan materi	Semua topik	Sangat lengkap	Lengkap	Kurang	Tidak
Analisis kebijakan	Evaluasi regulasi	Sangat kritis	Cukup	Kurang	Tidak
Argumentasi hukum	Logika hukum	Sangat kuat	Kuat	Lemah	Tidak

D. Keterkaitan Rubrik dengan CPL

CPL Indikator Penilaian

CPL1 Sikap, etika, dan tanggung jawab dalam diskusi dan tugas

CPL2 Penguasaan konsep dan teori hukum

CPL4 Kemampuan analisis dan penyusunan solusi kebijakan

E. Catatan

- Rubrik ini disusun sesuai indikator pada setiap Sub-CPMK dalam RPS.
- Digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif.
- Dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian berbasis CPL secara kuantitatif.

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.